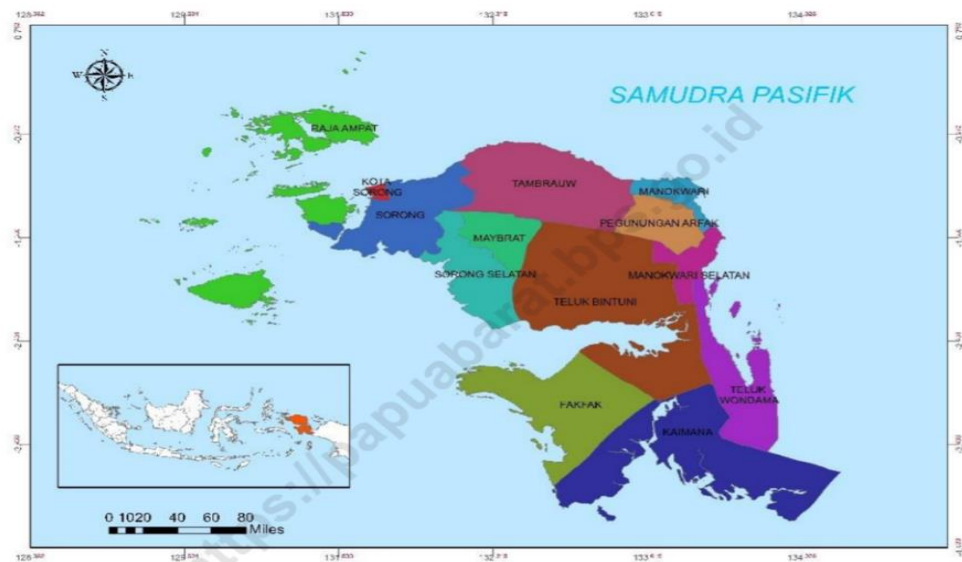


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi yang terletak di Timur Indonesia. Secara geografis terletak pada 124° - 132° BT dan 0° - 4° LS, tepat berada di bawah garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Provinsi Papua Barat, sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda (Provinsi Maluku), sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram (Provinsi Maluku) dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua.

Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat yang memegang peranan penting dalam pengembangan Provinsi Papua Barat, wilayah ini mempunyai pelabuhan penyeberangan yang dimana sarana angkutnya kapal Ro-Ro yaitu Pelabuhan Marampa.



Sumber : Papua Barat dalam Angka, Tahun (2020)

Gambar 1.1. Peta Administratif Provinsi Papua Barat

Angkutan penyeberangan merupakan jembatan bergerak bagi jaringan transportasi yang terpisah oleh perairan dan belum adanya jalur darat yang

memadai untuk dilalui. Dalam sistem transportasi ini pelabuhan penyeberangan memegang peran penting dan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perpindahan untuk menunjang kegiatan perekonomian, pendidikan serta pertumbuhan daerah.

Pelabuhan Penyeberangan Marampa memiliki fasilitas sisi daratan sebagai penunjang bagi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dipelabuhan. Untuk mewujudkan kelancaran kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan Marampa, maka perlu adanya fasilitas sisi daratan yang memadai dan dapat digunakan sesuai fungsinya masing – masing. Namun, di Pelabuhan Penyeberangan Marampa nyatanya masih terdapat fasilitas sisi daratan yang belum memadai dan penggunaannya yang belum optimal, seperti fasilitas ruang tunggu yang tidak sesuai sehingga masih banyak penumpang yang menunggu diluar ruang tunggu dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada di dalam ruang tunggu, tidak tersedianya fasilitas jalan akses penumpang (*gangway*) sehingga penumpang di pelabuhan marampa masih menggunakan lajur yang sama dengan kendaraan yaitu melalui pintu rampa yang mengakibatkan jalur masuk penumpang bersamaan dengan kendaraan yang bisa membahayakan keselamatan penumpang serta tidak tersedianya fasilitas jembatan timbang sehingga kendaraan yang akan menyeberang tidak diketahui berat muatannya yang bisa merusak ketahanan *moveable bridge* serta stabilitas kapal. Penelitian tentang evaluasi pelayanan penumpang pada angkutan penyeberangan di pelabuhan di Indonesia pernah dilakukan oleh Helon Dama Dalame (2018) dengan studi kasus pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Luwuk kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa di pelabuhan tersebut dari fasilitas sisi daratannya belum sesuai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengevaluasi ketersediaan fasilitas sisi daratan di Pelabuhan Penyeberangan Marampa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis bermaksud mengambil judul **“TINJAUAN KEBUTUHAN FASILITAS POKOK SISI**

DARATAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN MARAMPA PROVINSI PAPUA BARAT ”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan agar sasaran tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dibuat beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi saat ini fasilitas pokok sisi daratan berupa ruang tunggu, jalan akses penumpang (*gangway*) dan jembatan timbang di Pelabuhan Penyeberangan Marampa?
2. Apakah kondisi fasilitas pokok sisi daratan sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan KM Nomor 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar fasilitas pokok sisi daratan dapat sesuai dengan ketentuan berdasarkan KM Nomor 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini

- a. Untuk mengetahui kondisi saat ini fasilitas pokok sisi daratan berupa ruang tunggu, jalan akses penumpang (*gangway*) dan jembatan timbang di Pelabuhan Penyeberangan Marampa.
- b. Untuk mengetahui apakah kondisi fasilitas pokok sisi daratan sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan KM Nomor 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan agar fasilitas pokok sisi daratan dapat sesuai dengan ketentuan berdasarkan KM Nomor 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

1.3.2 Manfaat

- a. Manfaat Bagi Taruna

Dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib ini sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

b. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi

Kertas Kerja Wajib ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi SDP Palembang. Bagi Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Marampa, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, sehingga terlaksananya pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Pelabuhan Penyeberangan Marampa Kabupaten Manokwari.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian agar pokok permasalahan yang dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan yaitu masalah yang dibahas dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu dengan meneliti dan meninjau ruang tunggu , *gangway* , dan jembatan timbang.